

Analisis *Open Government* dan *e-Government* di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas

Muhammad Yamin, Arief Bakhtiar Darmawan, Nurul Azizah Zayzda, Maiza ash-Shafikh

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Jenderal Soedirman

Jl. HR Bunyamin 993, Grendeng, Purwokerto 55122

yamin.unsoed@gmail.com

Diserahkan: 13 Desember 2018; diterima: 11 Maret 2019

Abstract

This research paper aims to analyze the readiness of local government in Indonesia in order to fulfill the Sustainable Development Goals (SDGs) initiated by the United Nations for rural area level. The author analyzes the open government readiness in Melung Village, Banyumas Districts, Central Java, as a specific case to see the strategy and application of e-government model that was conducted by the government. This paper argues despite the location in the rural area, the government of Melung Village has utilized the system based on the SDGs framework, such as an action to replace paper-based administration into electronic government. This effort was taken to improve the efficiency of public services based on quality and accountability which leads to more active government participation in sharing information with its citizen. Nevertheless, the local government of Melung Village efforts were not good enough since they still need assistance from government and state-owned company. Therefore, the result of the research might strengthen local government institutional and able to fulfill the development goals as is set in SDGs framework.

Keywords: e-government, Melung Village, open government, sustainable development.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis kesiapan pemerintah lokal di Indonesia dalam rangka memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah pedesaan yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penulis menganalisis kesiapan pemerintahan terbuka di Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk melihat strategi dan penerapan model e-government oleh pemerintah. Tulisan ini berargumen, terlepas dari lokasinya yang berada di daerah pedesaan, pemerintah Desa Melung telah menggunakan sistem berdasarkan kerangka SDGs, seperti kebijakan untuk mengubah administrasi berbasis kertas (paper-based) menjadi pemerintahan elektronik. Upaya ini diambil untuk meningkatkan efisiensi layanan publik berdasarkan kualitas dan akuntabilitas yang kemudian mengarah pada partisipasi pemerintah yang lebih aktif dalam berbagi informasi dengan warganya. Namun demikian, upaya Pemerintah Desa Melung belum cukup baik karena masih bergantung pada bantuan pemerintah daerah dan perusahaan milik negara. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dipaparkan dalam tulisan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan pemerintah daerah dan mampu memenuhi tujuan pembangunan seperti ditetapkan dalam kerangka SDGs.

Kata kunci: pemerintahan terbuka, pemerintahan-el, tujuan pembangunan berkelanjutan, Desa Melung.

PENDAHULUAN

Artikel ini berusaha menganalisis respon pemerintahan Indonesia di tingkat lokal terhadap tantangan global masa kini.¹ Pembangunan ekonomi mengalami tantangan global di antaranya kesenjangan pertumbuhan ekonomi, krisis finansial, serta kerusakan lingkungan yang memiliki potensi

untuk membahayakan kehidupan masa mendatang. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, di tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). SDGs berisi 17 landasan pembangunan berkelanjutan yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. Dokumen tersebut merupakan lanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang berlaku dari tahun 2000 sampai 2015. SDGs merupakan gabungan antara kesepakatan dalam MDGs dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa depan (Griggs, 2013).²

Dalam upaya mengatasi hambatan terhadap SDGs, negara-negara membutuhkan transformasi dalam masyarakat yang lebih kompleks dari sebelumnya. Inovasi maupun teknologi yang digunakan dalam pemerintahan, dapat memberikan pendekatan menyeluruh serta memungkinkan keterlibatan lebih banyak aktor dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut dapat memacu keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara (United Nations Public Administration Network, 2014). Sistem informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan semua negara untuk mendekatkan jurang kemajuan antarnegara, misalnya dalam meningkatkan produktivitas pertumbuhan industri dan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta efisiensi kerja lainnya (Sachs *et al.*, 2015).

Dengan mengamati perkembangan tersebut, pemerintahan-el (akronim resmi dari frasa ‘pemerintahan elektronik’ atau terjemahan langsung dari ‘*e-government*’) merupakan sebuah cara yang berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan. Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang luas dan populasi yang besar. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011, Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1.913.578 km² (Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2012, luas Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.793 kecamatan, dan 79.075 desa (Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum, 2013). Sementara itu, berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 2017).

Wilayah yang luas, populasi besar yang tidak merata, dan beberapa permasalahan ekonomi lainnya, menjadi hambatan dan tantangan bagi Indonesia untuk menghubungkan seluruh wilayahnya dalam suatu sistem yang terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi yang perlu disikapi tidak hanya sekedar pemenuhan sumber daya finansial saja (Harijadi, 2004). Oleh karena itu, transformasi dari pemerintahan yang bersifat tradisional menuju pemerintahan berbasis elektronik harus dipertimbangkan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien. Tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi yang memperlihatkan kesuksesan adaptif dari suatu daerah, pemerintahan-el yang memiliki sifat pemerintahan terbuka (*open government*) ini juga merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan tatanan institusi yang berkembang sesuai tuntutan zaman. Hal ini terutama berhubungan dengan pencapaian tujuan dari SDGs, yang secara spesifik memuat pembahasan mengenai penguatan institusi. Tujuan yang termuat dalam poin ke-16 dari SDGs, yakni “*develop effective, accountable and transparent institution at all levels*” dalam poin 16.6, serta “*Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels*” dalam poin 16.7, dapat dilihat dan diwujudkan melalui pemerintahan elektronik terbuka (*open e-government*).

Tulisan ini berupaya menjelaskan strategi, tahapan, dan penerapan model pemerintahan-el oleh pemerintahan Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan Desa Melung tidak terlepas dari inisiatif dan akselerasi penyebaran informasi melalui teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa sekaligus karena desa ini merupakan pionir di Provinsi Jawa Tengah yang sadar akan manfaat internet. Penulis berargumen, dalam pelayanan masyarakat, pemerintahan Desa Melung telah

memanfaatkan pembangunan global guna memajukan daerah mereka seperti dalam kerangka SDGs, dibuktikan dengan upaya untuk meninggalkan administrasi berbasis kertas (*paper-based administration*) dan beralih pada pemerintahan berbasis elektronik (*electronic government*). Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien disertai dengan partisipasi aktif yang akuntabel dalam pemberian informasi merupakan wujud nyata pemanfaatan teknologi berbasis kemajuan global.

METODE RISET

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis deskriptif dalam membahas temuan penelitian yang dilakukan (Bryman, 2012). Dawson (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi perilaku, sikap, dan pengalaman subjek dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari pemikiran secara mendalam melalui observasi langsung di Desa Melung dan diskusi grup terfokus antarmitra institusi yang diinisiasi oleh penulis dalam meneliti.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan diskusi kelompok terhadap aktor dan pihak yang terlibat dalam inisiasi pembangunan pemerintahan-el di Desa Melung, yaitu kepala desa, perangkat desa seperti ketua RW dan ketua RT serta tokoh-tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.³ Wawancara kedua dilakukan dengan para ahli dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk digali pemikiran, saran, serta masukan terkait pemerintahan-el kolaboratif (*collaborative e-government*). Pakar yang dimaksud adalah Bapak Slamet Rosyadi yang merupakan ahli kebijakan publik dari Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman. Ketiga, diskusi kelompok yang melibatkan partisipasi pemerintah Desa Melung, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, serta aktor bisnis yang relevan.⁷ Pada kesempatan tersebut, pemerintah kabupaten diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan dari kalangan pelaku usaha diwakili oleh PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) regional Purwokerto. Data dan fakta di lapangan kemudian digunakan penulis untuk melakukan analisis secara teoretis. Untuk validasi data, sumber-sumber dan data-data yang berbeda ditrianggulasi dan digunakan sebagai basis analisis.

KERANGKA PEMIKIRAN

'OPEN GOVERNMENT' DAN 'E-GOVERNMENT' SEBAGAI LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bagian ini, penulis memaparkan landasan konseptual yang digunakan sebagai basis untuk menjelaskan kasus studi yang diambil. Konsep pemerintahan terbuka dan pemerintahan-el merupakan pintu masuk penerapan model pemerintahan-el yang menggabungkan peran aktor-aktor seperti negara (dalam hal ini pemerintah lokal), masyarakat, dan pengusaha dengan penggunaan teknologi seperti termaktub di kerangka kerja SDGs yang disusun oleh PBB. Kedua konsep tersebut diharapkan mampu menilai seberapa jauh keberhasilan penerapan pemerintahan-el di Desa Melung.

Konsep 'Open Government'

Meski belum ada kesepakatan, secara garis besar terdapat empat dimensi yang dikategorikan dalam definisi pemerintahan terbuka, yaitu hak atas informasi, partisipasi masyarakat sipil, publikasi data undang-undang dan pemerintahan, serta mekanisme komplain. Menurut *World Justice Project* (2015), definisi pemerintahan terbuka menunjukkan pemerintah sebagai lembaga penyebar informasi, mendorong partisipasi rakyat dalam pembahasan kebijakan publik, dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pemerintahan yang akuntabel.

Penerapan pemerintahan terbuka memiliki dua tujuan utama yang sangat penting (Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2016). Pertama adalah peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan lembaga yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Kedua,

meningkatkan andil dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan penting dengan dasar informasi yang lebih baik, sehingga kebijakan tersebut nantinya berdampak positif pada kualitas hidup mereka.

Konsep Pemerintahan-el

Menurut PBB, pemerintahan-el adalah “*utilizing the internet and the world-wide-web for delivering government information and services to citizens*” (DPEPA & ASPC, 2002: 1). Pemerintahan-el adalah salah satu cara untuk mengenalkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka seperti transparansi, partisipasi, kolaborasi. Meskipun muncul kata ‘internet’ dan ‘world-wide-web’ dalam definisi, konsep pemerintahan-el lebih menekankan pada poin ‘pemerintahan’ daripada poin ‘elektronik’ (Halachmi, 2005). Dengan pemerintahan-el, pemerintah mencari cara baru “*to effectively create public value thorough innovative, effective, inclusive, collaborative, open and citizen-oriented service delivery and public policy decision-making leveraging the potential of modern technologies*” (Lim, 2015). Pemerintahan-el merupakan transformasi hubungan antara negara dan rakyat perihal sejauh mana pelayanan publik mudah menjangkau dan dijangkau masyarakat. Kemudahan yang tersaji meliputi sisi aksesibilitas terhadap pelayanan dan informasi hingga sisi partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam praktiknya, media elektronik menawarkan jalan keluar untuk menciptakan situasi yang memungkinkan bagi keberhasilan tujuan tersebut.

Berdasarkan Bank Dunia (2004), terdapat tiga hal dari inisiasi pemerintahan-el yang dapat meningkatkan performa dalam sektor publik. Pertama, pelayanan melalui pemerintahan-el memberikan dampak positif pada masyarakat antara lain menurunkan penundaan, mendapatkan pelayanan satu atap, mengurangi frekuensi kehadiran langsung di instansi-instansi publik, hingga mengurangi peluang korupsi oleh pegawai pemerintahan berupa pungutan liar. Efeknya, prosedur dan aturan melalui internet akan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah pada pelayanan publik. Kedua, pelayanan terhadap pelaku usaha. Pentingnya pelayanan terhadap pelaku sektor bisnis atau pengusaha merupakan poin yang seringkali mengalami hambatan atau persoalan administratif ketika berhadapan dengan pemerintah. Perizinan berbasis elektronik mempersingkat waktu pengurusan dokumen yang berarti biaya transaksi antara pemerintah dan pengusaha menjadi berkurang. Ketiga, pemerintahan-el mengarahkan pada pengoptimalan produktivitas mengingat sistem elektronik mampu mengelola data dengan akurasi lebih tinggi dari pola manual. Sistem teknologi dan informasi juga memudahkan kompilasi dan penyusunan data untuk analisis kebijakan di masa yang akan datang.

Kontribusi pemerintahan-el dalam SDGs, menurut Lim (2015), bisa melalui setidaknya enam cara: (1) pemerintahan-el menerapkan proses kerja yang lebih efisien dan efektif; (2) akses dan kualitas pelayanan lebih baik; (3) perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan sekaligus; (4) mendorong partisipasi masyarakat; (5) pemerintahan yang berwawasan lingkungan; dan (6) transparansi melalui keterbukaan data.

PBB membuat empat tahapan bagaimana negara hadir melalui situs daring (United Nations, 2012). Tahapan-tahapan yang ditentukan oleh PBB tersebut memperlihatkan kesiapan pemerintahan negara-negara di dunia menurut skala pelayanan publik mutakhir yang progresif. Tahapan pertama adalah kemunculan kehadiran (*emerging presence*). Dalam tahap ini, pemerintahan suatu negara menyediakan informasi secara terbatas dan hanya bersifat dasar, seperti pidato kepala negara atau dokumen konstitusi. Tidak ada situs yang terhubung pada kementerian penting lain seperti kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, atau kementerian keuangan. Tahapan kedua adalah kehadiran yang telah ditingkatkan (*enhanced presence*). Pada tahapan ini, pemerintah menyediakan sumber dan informasi terkini mengenai kebijakan publik dan pemerintahan seperti kebijakan, hukum dan regulasi,

berita-berita, laporan berkala, serta basis data lain yang bisa diunduh oleh pengguna internet. Interaksi pada tahapan ini didominasi oleh aliran informasi dari pemerintah ke rakyat.

Tahapan ketiga adalah kehadiran transaksional (*transactional presence*). Apabila suatu negara telah sampai pada tahapan ini, ciri-ciri yang melekat adalah adanya interaksi dua arah antara rakyat dan pemerintah. Hal-hal pelayanan publik yang relevan dalam tahap ini adalah pilihan untuk membayar pajak, mendaftarkan diri untuk pembuatan kartu identitas, sertifikat kelahiran, atau perpanjangan paspor, dan lisensi-lisensi tertentu. Tahapan keempat adalah kehadiran terkoneksi (*connected presence*). Pada tahapan terakhir ini, pemerintah mendorong partisipasi yang lebih bebas dalam pembuatan keputusan dan memiliki keinginan untuk melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka dua arah. Pemerintah juga secara aktif menyediakan mekanisme pengumpulan pandangan masyarakat dalam kebijakan publik, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan yang demokratis. Tahapan ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk memperkuat dan menyesuaikan diri terhadap keberpihakan pada hak-hak demokrasi rakyat.⁴

Keempat tahapan yang telah penulis paparkan di atas dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu agen-agen suatu negara dalam meningkatkan kemajuan berbasis pemerintahan-el (Fath-Allah *et al.*, 2014). Berdasarkan tahapan-tahapan menurut PBB tersebut, penulis berusaha mengidentifikasi tahapan yang telah ditempuh oleh pemerintah Desa Melung dalam menerapkan model pemerintahan-el. Selanjutnya, penulis mengamati strategi-strategi pemerintah Desa Melung dalam upayanya menerapkan model tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIAPAN INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

Bagi Indonesia, persoalan wilayah daratan yang luas dan populasi yang besar membuat upaya-upaya akses layanan dan infrastruktur daring menjadi sumber tantangan tersendiri karena membutuhkan investasi besar dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan pendidikan. Apalagi, meskipun telepon seluler telah menyebar pesat, negara-negara berkembang masih memiliki masalah dalam hal konektivitas (United Nations, 2012). Indonesia sebagai negara berkembang tentu saja harus menyediakan banyak titik-titik akses daring, sementara sumber daya finansial untuk membangun titik akses tersebut tidak sebanyak sumber daya negara-negara maju yang memiliki pendapatan rata-rata tinggi.

Pemerintah Indonesia mulai melirik penggunaan teknologi komunikasi dan informasi pada awal tahun 2000-an (Hidayanto *et al.*, 2014). Pada tahun 2001, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 6/2001 tentang Pengembangan dan Penggunaan Telematika di Indonesia tertanggal 24 April 2001. Instruksi tersebut memerintahkan pejabat pemerintahan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan mempercepat proses demokrasi. Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang bertanggal 9 Juni 2003. Dalam instruksinya, hampir sama dengan Instruksi Presiden No. 6/2001, presiden memberi mandat wali kota, bupati, dan gubernur untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengimplementasikan pemerintahan-el. Setahun setelahnya, pemerintahan menerbitkan Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengambil inisiatif kebijakan. Undang-undang tersebut menggesar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat pada kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelesaikan persoalan daerahnya sendiri. Pemerintahan daerah memiliki peluang mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, termasuk dalam penerapan pemerintahan-el.

Secara umum, Indonesia memiliki potensi cukup baik dalam indeks penilaian pemerintahan terbuka. Dalam survei *Project Open Government Index 2015* yang dilakukan oleh tim peneliti *World Justice Project*, Indonesia menempati peringkat 32 dari 102 negara dengan skor 0,58.⁵ Negara Asia Tenggara yang ada di atas Indonesia adalah Singapura, yang berada di peringkat 25 dengan skor 0,63 (*World Justice Project*, 2015). Meski demikian, Indonesia memiliki nilai indeks kesiapan pemerintahan-el di bawah rata-rata kesiapan dunia.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PBB, indeks kesiapan pemerintahan-el Indonesia pada tahun 2005 berada pada angka 0,3819.⁶ Dengan angka tersebut, Indonesia berada di urutan 96 atau turun 11 posisi dari tahun 2004 yang berada pada posisi 84 (*United Nations*, 2005). Tiga negara teratas di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah Korea Selatan (indeks 0,8727, peringkat 5 dunia), Singapura (indeks 0,8503, peringkat 7 dunia), dan Jepang (indeks 0,7801, peringkat 14 dunia). Menurut laporan PBB tersebut, posisi Indonesia menunjukkan kemajuan dari tahun sebelumnya, namun hanya memiliki indeks sekitar 20-25% saja dari kesiapan negara-negara terdepan seperti Korea Selatan atau Singapura (*United Nations*, 2005). Kesiapan indeks Indonesia bahkan lebih rendah dari rata-rata kesiapan pemerintahan-el dunia yang berada pada angka 0,4627 (*United Nations*, 2005). Pada tahun 2010 dan 2012, *e-Government Development Index* (EGDI) Indonesia menunjukkan kesiapan sebesar 0,4026 dan 0,4949, yang menempatkan Indonesia pada posisi 109 dan 97 (*United Nations*, 2012). Pada tahun 2014, Indonesia masih berada pada level menengah. Meskipun ada kenaikan nilai dari tahun sebelumnya, peringkat kesiapan Indonesia turun ke peringkat 106, di mana angka EGDI Indonesia hanya mencapai 0,4487 (*United Nations*, 2014). Menurut laporan tersebut, Indonesia merupakan negara berpendapatan rendah-menengah yang berpotensi untuk maju dengan cepat (*United Nations*, 2014). Pada tahun 2014, rata-rata kesiapan pemerintahan-el dunia berada pada angka 0,4712 (*United Nations*, 2014). Pada dasarnya, hambatan utama pembangunan pemerintahan-el di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kurangnya akses terhadap infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi serta infrastruktur pendidikan (*United Nations*, 2012). Negara membutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur teknologi komunikasi sampai ke daerah-daerah pelosok dan membangun infrastruktur pendidikan untuk menumbuhkan budaya melek literasi dan teknologi pada populasi yang besar.

Pada survei indeks pembangunan pemerintahan-el tahun 2012, indeks Indonesia yang berjumlah 0,4949 berasal dari tiga komponen, yaitu komponen pelayanan daring (indeks 0,4967), komponen infrastruktur telekomunikasi (0,1897), dan komponen pembangunan manusia (0,7982). Dari tiga komponen tersebut, Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia yang cukup potensial untuk menuju pemerintahan-el.

Kesadaran dan Kesiapan Desa Melung terhadap Pemerintahan Terbuka

The Web Foundation merupakan salah satu organisasi yang berkonsentrasi pada ketersediaan dan peningkatan situs terbuka di seluruh dunia yang berpusat di Washington D.C. Organisasi ini meyakini inisiasi yang fokus pada informasi dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat dan harus direncanakan secara matang guna meraih paradigma pemerintahan terbuka yang dapat menyajikan kepada masyarakat akan informasi pemerintahan yang lebih terpercaya serta kesempatan berpartisipasi langsung dan aktif dalam pembuatan kebijakan politik (*United Nations*, 2014).

Inisiasi pemerintahan terbuka dan pengimplementasian pemerintahan-el diawali dengan masuknya jaringan internet nirkabel (*wifi*) yang diinisiasi oleh Bapak Budi Satrio yang merupakan Kepala Desa Melung periode 2008. Ketersediaan jaringan internet yang memadai ini, didukung oleh bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas usulannya. Untuk mengoptimalkan fungsi

infrastruktur yang tersedia, pemerintah Desa Melung bekerja sama dengan komuitas pemrograman dan internet daerah Purwokerto dalam rangka memperkenalkan penggunaan internet kepada perangkat desa melalui sebuah pelatihan. Salah satu komunitas yang dilibatkan dalam kerja sama ini adalah Gerakan Desa Membangun.⁸ Tidak hanya itu, pemeliharaan fasilitas ini juga dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan dana swadaya misalnya untuk keperluan pembiayaan jaringan internet, penyediaan aplikasi jaringan, dan pemeliharaan portal resmi desa.

Dalam situs Desa Melung dapat ditemukan berbagai artikel mengenai informasi desa, termasuk sosialisasi kebijakan, peraturan dan undang-undang terkait kegiatan maupun aktifitas desa, dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang merupakan proyeksi pembangunan desa lima tahunan. Berbagai data mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) juga telah di unggah secara berkala setiap tahunnya. Kelengkapan portal yang sedemikian rupa menunjukkan kesadaran pemerintah akan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka yaitu perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tansparan, sekaligus sebagai upaya untuk memantik komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakatnya. Seperti disampaikan oleh Bapak Budi Satrio,

“Kami ingin menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, ini lho APBDes kami. Agar dana yang diberikan kepada pemerintah desa bisa dipercaya oleh pemerintah pusat. Dengan infografis, pemerintah desa dari Aceh sampai Papua, misalnya, ini anggaran kami. Salah satunya untuk menjawab keraguan pemerintah dan pemangku kebijakan yang lain (8/2018).”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa tidak hanya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat namun juga kepercayaan dari tingkat pemerintahan di atasnya (termasuk pemerintah kabupaten dan pemangku kebijakan lainnya).

Bagi pemerintah Desa Melung keberadaan portal ini menjadi sebuah pencapaian yang berarti pemerintah desa pun cukup kompeten dalam hal teknologi, berkemauan dalam meminimalkan korupsi dana desa seperti asumsi pada umumnya. Merurut Timbul Yulianto, salah satu perangkat Desa Melung, selama ini prestasi desa sangat jarang sekali diekspos dalam berita, sehingga muncul skeptisme dari pemerintah pusat terhadap tata kelola pemerintah desa. Bahkan pemerintah pusat sempat mewacanakan satuan tugas (satgas) untuk mengawasi langsung kinerja pemangku kebijakan dalam mengelola dana desa. Dapat diasumsikan bahwa ketidaktahuan dan kurang terbukanya suatu pemerintahan desa akan mengakibatkan respon kurang tepat dari pemerintahan di atasnya. Padahal, yang diperlukan desa dalam kasus Desa Melung ini adalah pendampingan secara langsung dalam membangun daerahnya.⁹

Dalam hal partisipasi masyarakat, keterbukaan akses informasi terhadap anggaran desa dan undang-undang mengenai tata kerja desa sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Melung. Hanya saja, pengakses atau pengunjung situs Desa Melung masih terbatas pada kalangan tertentu saja, yakni pengguna telepon pintar (*smartphone*) yang berusia muda dan tokoh-tokoh masyarakat. Meski demikian, hasil wawancara memperlihatkan antusiasme masyarakat Desa Melung terhadap mekanisme pelayanan pemerintah desa yang dilakukan secara daring.

Dari sisi mekanisme komunikasi warga, khususnya mengenai komplain dan permasalahan lain, warga Desa Melung dapat menyampaikan usulan dan keluhannya melalui media sosial seperti WhatsApp, BBM, pesan daring di Facebook dan SMS. Meskipun demikian, tatap muka langsung melalui pertemuan warga dan perangkat desa masih menjadi pilihan utama, seperti halnya pertemuan rutin RW, RT, hingga musyawarah desa.

Sinkronisasi antara karakteristik pemerintahan terbuka dan fakta-fakta di lapangan, penulis menemukan bahwa perangkat dan pemerintahan Desa Melung telah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel seperti yang tercantum pada

poin 16 SDGs. Hal tersebut menyajikan dua peluang penting. Pertama, peningkatan potensi kualitas pengaturan dan pelayanan untuk menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap masyarakat telah dimiliki oleh pemerintahan Desa Melung. Kedua, kesempatan berpartisipasi dan keterlibatan warga desa dalam pembuatan keputusan-keputusan penting berdasarkan informasi yang cukup telah disediakan pemerintah desa, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tahapan Enhanced Presence dalam Penerapan Pemerintahan-el di Desa Melung

Berdasarkan karakter dari PBB, penulis menggolongkan perkembangan pemerintahan-el di Desa Melung sudah ada pada tahapan *enhanced presence* dan sudah memiliki sedikit karakter *connected presence*. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada landasan konseptual, pada tahapan ini, pemerintah menyediakan sumber dan informasi terkini mengenai kebijakan publik dan pemerintahan seperti kebijakan, hukum, dan regulasi, berita-berita, laporan berkala, serta basis data lain yang bisa diunduh oleh pengguna internet. Di sini, pengguna memiliki pilihan untuk mencari dokumen tertentu yang diinginkan. Situs juga menyediakan fitur yang membantu pengguna. Dokumen-dokumen kebijakan publik yang tersedia juga lebih detail, seperti strategi pemerintah atau ringkasan kebijakan dalam isu-isu pendidikan dan kesehatan yang spesifik. Meski telah lebih maju, interaksi pada tahapan ini masih didominasi oleh aliran informasi dari pemerintah ke rakyat. Dengan menganalisis situs dan melalui wawancara terhadap pejabat pemerintahan lokal Desa Melung, tahapan *emerging presence* dengan demikian sudah berhasil dipenuhi, yang mana situs resmi Desa Melung sudah berisikan beragam jenis materi: (1) profil desa; (2) lembaga; (3) komoditas unggulan; (4) peraturan desa; serta (5) data statistik.

Lebih dari itu, situs resmi Desa Melung telah memenuhi kriteria berupa tautan ke situs pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Beberapa situs pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang telah terhubung dengan situs Desa Melung di antaranya: (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas; (2) Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas; (3) pemerintah Provinsi Jawa Tengah; (4) Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi RI; (5) Kementerian Pertanian; (6) Kementerian Dalam Negeri RI; (7) Kementerian Telekomunikasi dan Informasi; (8) Portal Nasional Republik Indonesia; (9) Wonderful Indonesia. Sebagai tambahan, situs resmi Desa Melung juga menautkan beberapa situs lembaga non pemerintah, di antaranya: (1) Relawan TIK Indonesia; (2) Gerakan Desa Membangun (3) Gedhe Foundation; (4) Layanan Website Desa Indonesia; (5) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia;

Karakter *enhanced presence* juga telah dipenuhi oleh situs Desa Melung. Pembaharuan berita rutin dilakukan dalam situs ini. Dari sisi tampilan di dalam beranda (*home*) memperlihatkan unggahan (*upload*) terbaru pada Juli 2017 (tulisan ini dibuat pada Agustus 2017). Tombol pencarian (*search*) tersedia dan berfungsi dengan baik dan normal. Di sisi lain, situs ini menyediakan dokumen-dokumen yang rinci, di antaranya dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (diperbaharui pada tahun 2017), dan perencanaan jangka menengah desa. Namun pada peraturan desa (*perdes*) situs Desa Melung hanya menampilkan peraturan mengenai ruwatan dan sedekah bumi, serta *perdes* SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Untuk info-info terbaru, situs Desa Melung berusaha menampilkan hal yang lebih baik dari situs pemerintah kabupaten, seperti yang disampaikan mantan Kepala Desa Melung Budi Satrio.

“Update berita di situs Kabupaten Banyumas itu harus konsisten. Saya melihat, mohon maaf, kurang. Saya untuk Melung kira-kira punya hampir 600-an tulisan. Mungkin kalau tidak hilang bisa sampai 800-an. Artinya, dibandingkan kabupaten, Melung mencoba lebih bagus. Kami protes (pada pemerintah), tapi ada bukti. Pemerintah di atas kami harus memberi contoh.”

Hingga observasi selesai dilakukan, belum ditemukan karakter untuk tahapan *transactional presence*. Interaksi dua arah hampir tidak ditemukan di situs ini misalnya berupa fitur pembayaran pajak, pendaftaran diri untuk keperluan dokumen resmi pribadi. Akan tetapi, fitur komentar yang merupakan karakter tahap pertama dari *connected presence* sudah disediakan. Kolom komentar ini tersedia di setiap unggahan berita dan laman lainnya. Sejauh pengamatan penulis, fitur komentar belum banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyumbangkan gagasan mereka. Penyebabnya adalah masyarakat lebih memilih menemui kepala desa atau perangkat desa secara langsung jika memiliki saran atau usulan yang ingin disampaikan. Di lain sisi, fitur komentar justru sudah digunakan oleh individu di luar Desa untuk berinteraksi dengan Desa Melung.

Tahapan dan pemaparan karakter pemerintahan-el yang berada pada tahap *enhanced presence* di Desa Melung dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis *e-government* situs Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

No.	Tahapan	Karakter	Hasil Desa Melung
1.	<i>Emerging Presence</i>	Situs sekedar berisi info secara terbatas dan bersifat dasar	Sudah berisikan: profil desa, lembaga, produk unggulan, peraturan desa, statistik, dan berita terbaru
		Tidak terhubung ke situs pemerintahan yang lain	Telah tersedia
		Tidak terhubung ke situs pemerintah pusat	Pemerintah Kabupaten; Dinas Kominfo Kabupaten; Pemerintah Provinsi; Wonderful Indonesia; Portal Nasional Republik Indonesia; Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi RI; Kementerian Pertanian RI; Kementerian Kominfo RI; MITRA; Gerakan Desa Membangun; Layanan Website Desa Indonesia; Relawan TIK Indonesia; Pengelola Nama Domain Internet Indonesia; Gedhe Foundation
2.	<i>Enhanced Presence</i>	Ada informasi serta berita-berita berkala (<i>update</i>)	Telah tersedia, sering diperbarui, berita ditampilkan di beranda
		Ada data yang bisa diunduh dan fasilitas pencarian atau 'search'	Telah tersedia dan berfungsi baik
		Dokumen yang tersedia lebih detail, misal strategi pemerintah atau ringkasan kebijakan dalam isu-isu penting dan spesifik (misal pendidikan & kesehatan)	Telah tersedia dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (diperbarui 2017), dan perencanaan desa jangka menengah. Namun Perdes yang tersedia hanya mengenai ruwatan dan sedekah bumi dan Perdes SOTK (struktur organisasi dan tata kerja pemerintah)
3.	<i>Transactional Presence</i>	Ada interaksi dua arah atau pemerintah-masyarakat	Belum tersedia
		Ada pilihan untuk membayar pajak	Belum tersedia
		Ada pilihan untuk mendaftarkan diri untuk membuat kartu identitas, akta kelahiran, perpanjangan paspor, atau lisensi lainnya	Belum tersedia
		Akses situs dan pengiriman data	Belum tersedia

		jam	
4.	<i>Connected Presence</i>	Ada fitur komentar	Telah tersedia, namun belum terlalu digunakan oleh penduduk desa sendiri
		Ada fitur untuk mengumpulkan pandangan masyarakat dalam kebijakan publik atau pembuatan undang-undang	Belum ada fitur khusus untuk ini (pengumpulan pandangan masyarakat masih dilakukan melalui mekanisme musyawarah rembug desa)

Sumber: diolah oleh penulis (2017).

KESIMPULAN

Inovasi dan teknologi yang digunakan oleh pemerintahan menjadi pendorong pada pendekatan yang lebih holistik atau menyeluruh serta dapat menyelesaikan masalah dengan melibatkan peran banyak aktor di dalamnya. Pada level internasional, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu perantara untuk mendekatkan jurang kemajuan antarnegara, misalnya dalam meningkatkan produktivitas pertumbuhan industri dan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta efisiensi kerja lainnya. Oleh karena itu, konsep pemerintahan-el merupakan konsep yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien sampai di tingkat pemerintah lokal. Untuk menuju pemerintahan-el yang baik, kesadaran terhadap pemerintahan terbuka merupakan kesadaran pemahaman yang harus muncul terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kesadaran pemerintahan terbuka dan kesiapan pemerintahan-el di Indonesia dalam level negara dan level daerah. Menurut data penelitian *World Justice Project*, Indonesia merupakan negara dengan kesadaran pemerintahan terbuka yang relatif tinggi. Menurut data penelitian *World Justice Project* tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-32 dari 102 negara yang diteliti. Sementara, menurut data terbaru PBB yang dikeluarkan pada tahun 2014, Indonesia berada pada posisi 106. Meski termasuk peringkat rendah, Indonesia merupakan negara berpendapatan rendah-menengah yang berpotensi maju dengan cepat dalam pembangunan kesiapan pemerintahan-el karena memiliki nilai komponen pembangunan manusia yang tinggi ketimbang komponen pelayanan daring dan komponen infrastruktur telekomunikasi.

Dalam kasus Desa Melung, kesadaran yang baik akan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka telah dimiliki oleh perangkat Desa. Pemangku jabatan tersebut, termasuk kepala desa dan perangkat lain juga berkomitmen memberikan pelayanan yang akuntabel pada masyarakat. Hal ini terbukti dari pemaparan informasi berupa anggaran dana desa, undang-undang, dan kebijakan desa dalam situs resmi Desa Melung. Situs desa ini juga telah memiliki kolom pencarian dan dokumen yang cukup detail serta menampilkan berita secara berkala. Kesadaran mengenai pemerintahan terbuka yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan poin 17 SDGs telah menjadi modal pemerintahan-el di Desa Melung. Dengan tahapan yang telah dicapai, maka Desa Melung dapat dikategorikan ke dalam tahap *enhanced presence*. Namun demikian, jika terus berbenah, strategi pengembangan pemerintah-el di Desa Melung berpotensi menjadi desa percontohan bagi pengembangan pemerintahan-el di desa-desa lainnya.

CATATAN BELAKANG

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis dari Riset Institusi Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017 dengan tema *Rekayasa Sosial dan Pengembangan Pedesaan yang dibiayai oleh Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman*.

² SDGs merupakan dokumen transisi yang berusaha menyempurnakan MDGs. MDGs terlihat tidak lagi relevan dalam agenda pembangunan internasional. Poin yang berubah, misalnya, pembangunan MDGs

yang fokus pada aktor pemerintah diganti dengan pembangunan model SDGs yang lebih melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Lim, 2015). SDGs lebih menekankan kerja sama global daripada MDGs yang lebih menekankan pada konteks bantuan Utara kepada Selatan (Lim, 2015; Coonrod, 2014). SDGs juga memiliki fokus pada kualitas daripada kuantitas, misal pada poin meningkatkan kualitas pendidikan yang dalam MDGs masih bertujuan untuk mencapai pendidikan yang universal. Poin pembangunan berkelanjutan dalam SDGs ditampilkan dalam kategori yang lebih beragam daripada satu poin saja pada MDGs, seperti adanya sanitasi dan air bersih, kehidupan di bawah air, dan energi yang terjangkau dan ramah lingkungan.

³ Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Melung periode 2008-2013 Bapak Budi Satrio dan Kepala Desa Melung masa jabatan 2013-2018, Bapak Khaerudin. Kedua narasumber ini dipilih karena inisiasi penyediaan internet dan pembuatan situs pemerintah Desa Melung dimulai dari kepala desa sebelum kedua narasumber tersebut menjabat.

⁴ Dalam *e-Government Readiness Report 2005*, PBB membuat lima tahapan suatu negara dalam menjalankan pemerintahan-el. Dalam *e-Government Survey 2012*, PBB mengubah tahapan tersebut menjadi empat tahapan yang penulis tampilkan dalam penelitian ini. Yang dihilangkan adalah tahapan *interactive presence*. Sementara tahapan terakhir pada survei tahun 2012 diberi istilah *networked presence* (United Nations, 2005: 16). PBB kembali memakai empat tahapan dalam survei 2012 itu pada *e-Government Survey 2014*.

⁵ WJP mengambil data melalui dua cara: (1) pemungutan suara dengan mengambil 1000 koresponden di tiga kota terbesar di negara bersangkutan; dan (2) penyebaran kuesioner tertutup pada para akademisi dan praktisi yang ahli dalam bidang hukum sipil dan komersil, peradilan kriminal, hukum buruh, dan kesehatan masyarakat. Jumlah 102 negara yang diteliti tersebut memenuhi sekitar lebih dari 90 persen populasi dunia (World Justice Project, 2015).

⁶ Survei pemerintahan-el yang dilakukan PBB merupakan survei untuk menilai kapasitas dan keinginan sektor publik dalam menggunakan ICT untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam pelayanan publik. Penilaian itu memiliki poin-poin sebagai berikut: "*Capacity espouses financial, infrastructural, human capital, regulatory, administrative, and systemic capability of the state. The willingness, on part of the government, to provide information and knowledge for the empowerment of the citizen is a testament to the government's commitment.*" Dengan adanya survei ini, PBB memiliki tujuan untuk memberi informasi dan meningkatkan pemahaman pilihan pembuat kebijakan dalam program pemerintahan-el masing-masing negara di dunia (United Nations, 2005: 13).

⁷ Diskusi grup terfokus dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2017.

⁸ Situs Desa Melung dapat dilihat melalui www.melung.desa.id.

⁹ Timbul Yulianto menyatakan pendampingan desa yang telah berlangsung belum berhasil karena pembimbingan hanya dilakukan dengan menanyakan data-data mengenai kemajuan yang telah dicapai saja tanpa ada saran ataupun usulan yang membangun.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2017). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2015. Diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). New York: Oxford University Press Inc.
- Choucri, N. (2012). The Convergence of Cyberspace and Sustainability. *E-International Relations*. Diakses dari <http://www.e-ir.info/2012/04/20/the-convergence-of-cyberspace-and-sustainability/>
- Coonrod, J. (2014). MDGs to SDGs: Top 10 Differences. *New York: The Hunger Project*. Diakses dari <https://advocacy.thp.org/2014/08/08/mdgs-to-sdgs/>
- Dawson, C. (2007). *A Practical Guide to Research Methods* (3rd ed.). Oxford: How to Books.
- Fath-Allah et al. (2014). e-Government Maturity Model. *International Journal of Software Engineering & Application*, 5(3), pp. 71-92.
- Griggs, D. (2013). From MDGs to SDGs: Key Challenges and Opportunities. Presentasi disampaikan dalam diskusi panel bertema "*Sustainable Development Goals as a Driver for Trans-disciplinary Research and Education - A View from the Nature Article Authors*" pada 19 Juni 2013, di New York, Amerika Serikat.

- Halachmi, A. (2005). e-Government Theory and Practice: The Evidence from Tennessee (USA). Dalam M. Holzer, M. Zhang, K. Dong. (eds.), *Proceedings of the Second Sino-U.S. International Conference: Public Administration in the Changing World.* New Jersey: National Center for Public Productivity, pp. 24-36.
- Harijadi, D. A. (2004). Developing e-Government: The Case of Indonesia. Presentasi disampaikan dalam *APEC Telecommunications and Information Working Group*, 21-26 Maret 2014, di Hongkong, Tiongkok.
- Harrison et al. (2011). Open Government and e-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. *The Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*, 12-15 Juni, College Park, MD, USA.
- Hidayanto et al. (2014). The Obstacles of the e-Government Implementation: A Case of Riau Province, Indonesia. *Journal of Industrial and Intelligent Information*, 2(2), pp. 126-130.
- Information and Privacy Commissioner of Ontario. (2016). Open Government: Key Concepts and Benefits. Diakses dari <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/09/Open-Government-Key-Concepts-and-Benefits.pdf>
- Lim, J. (2015). *e-Government for Sustainable Development in SIDS*. Seoul: United Nations Project Office on Governance.
- Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2013*. Jakarta: Penulis.
- Sachs et al. (2015). *ICT and SDGs: How Information and Communications Technology Can Achieve the Sustainable Development Goals*. New York: Earth Institute and Ericsson.
- United Nations. (2014). *e-Government Survey 2014: e-Government for the Future We Want*. New York: Penulis.
- _____. (2012). *e-Government Survey 2012: e-Government for the People*. New York: Penulis.
- _____. (2005). *UN Global e-Government Readiness Report 2005: from e-government to e-inclusion*. New York: Penulis.
- United Nations Public Administration Network. (2014). *ICT and e-Government in SIDS*. New York: UNPAN.
- World Bank. (2004). Building Blocks of e-Government: lessons from developing countries. Diakses dari <http://www1.worldbank.org/prem/PREMINotes/premnote91.pdf>
- World Justice Project. (2015). *Open Government Index 2015 Report*. Washington D.C.: Penulis.
- Satrio, B. (2017, Agustus). Wawancara. (M. Yamin, Pewawancara).
- Rosyadi, S. (2017, Agustus). Wawancara. (M. Yamin, Pewawancara).